



# Tagih Kasus Bansos KONI

## Tolok Ukur Kinerja Polda

**PONTIANAK**—Penyelesaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Bansos KONI Kalbar dianggap merupakan tolak ukur kinerja bagi Polda Kalbar. Kasus tersebut sudah terlalu lama berjalan namun belum kunjung tuntas, meski

baru-baru ini pihak terkait berhasil menyeret beberapa tersangka.

“Saya yakin masih ada tersangka lain. Barometer keberhasilan Polda Kalbar diukur apabila kasus bansos tuntas. Kasus Bansos sudah ada tersangkanya. Bahkan hasil audit telah jelas mengungkapkan indikasi kerugian negara.

• ke halaman 15 kolom 1



## Tagih Kasus Bansos KONI

*sambungan dari halaman 9*

Sangat disayangkan jika kasus Bansos terus menganggang, kata ketua Umum DPP LAKI Burhanudin. Abdullah di Pontianak, kemarin.

Menurut dia, sangat diharapkan kepolisian mampu menuntaskan kasus Bansos KONI. Apalagi BPK sudah menyerah hasil audit investigasi ke KPK. Sebelum kemudian KPK menyerahkan penanganan kasusnya ke Polda Kalbar, karena mengganggu penguasaan oleh Polda lebih maju. Burhan menambahkan pucuk pimpinan Polda Kalbar sudah beberapa kali mengalami pergantian.

Tetapi kasus Bansos tetap belum ada kemajuan. Sementara tumpuan harapan hukum untuk kasus Bansos kini berada ditangan Polda Kalbar. Menurut Burhan, surat izin

presiden juga kerap menjadi dalih aparat penegak hukum bila lambat menangani kasus dugaan korupsi.

Sebab UU Nomor 23/2003 mengenai Susunan dan kedudukan Anggota DPR, DPRD, dan DPD, sudah mengatur khusus dugaan keterlibatan tindak pidana korupsi dan terorisme. Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian berhak memeriksa tanpa izin Presiden.

"Aparat penegak hukum idealnya bisa langsung memeriksa pejabat negara maupun anggota Dewan selama memiliki bukti awal. Seharusnya, siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme tak terkecuali presiden harus segera diperiksa tanpa perlu izin. Karena, dua kejahatan itu merupakan kejahatan berbahaya," kata Burhanudin.

Menurut dia, kasus Bansos adalah kasus besar. Mengingat hasil temuan audit investigasi menemukan indikasi kerugian negara mencapai kisaran Rp22, 14 miliar. Sehingga dia amat menyayangkan apabila bila penguasaan kasus Bansos harus berjalan lambat. "Polda Kalbar mestinya berani mengambil langkah memeriksasaksi yang berstatus pejabat negara walau tanpa surat izin Presiden," pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar mengatakan, pihaknya terus berusaha melakukan penyelidikan bersama pihak terkait. Terutama mengungkap tersangka baru dalam kasus tersebut. Dia menuturkan, pihaknya sudah lama terjun ke lapangan untuk mencari tersangka baru. Kendari demikian, pihaknya juga mem-

inta pada jajaran kejaksaan untuk mendukung penuh menyelesaikan kasus ini. "Waktu itu kita telah menyeret Iswanto sebagai tersangka. Sebelumnya, berkas-berkas dianggap sulit untuk dilengkap. Kita harus bolak-balik ke kejaksaan untuk melimpahkan kasus tersebut. Akhirnya, Iswanto diseret ke pengadilan," ungkap Mukson.

Untuk itu, lanjut dia, pihak bersangkutan mesti mendukung dan memuluskan segala pengurusan terkait kelengkapan berkas. Jika ada tersangka lain lagi, maka segala pengurusanannya cepat dilakukan, bukan menjadi dilema seperti tersangka Iswanto.

"Kita terus bekerja dan memaksimalkan penyelidikan. Bukan jalan di tempat, jika memang ada tersangka lain lagi, tetap kita publikasi," tegasnya. (rmm)